



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA

**PERS RELEASE**

**SERAH TERIMA JABATAN (SERTIJAB)  
KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI DKI JAKARTA**

Pada hari Kamis, 30 Agustus 2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan acara sertijab. Kepala Perwakilan sebelumnya, Syamsudin yang menjabat sejak Februari 2016 digantikan oleh Yuan Candra Djaisin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu. Acara dilaksanakan mulai pukul 09.30 WIB dan disaksikan oleh Anggota V BPK RI, Ir. Isma Yatun, M.T serta Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama KN V), Dr. Bambang Pamungkas, MBA., CA., Ak.

Sekretaris Jenderal BPK telah melantik Yuan Candra Djaisin untuk menggantikan Syamsudin sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2018, berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 228 /K/X-X.3/08/2018. Syamsudin selanjutnya mengemban tugas sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah.

Anggota V BPK RI menyampaikan bahwa proses mutasi, rotasi yang BPK lakukan tersebut merupakan sebuah proses yang alami bagi setiap organisasi. Mutasi ini, dilakukan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kebutuhan organisasi, tetapi juga diharapkan dapat menjadi penyegaran dan pendorong bagi para pejabat terkait, untuk meningkatkan kinerjanya di unit kerja barunya.

Selanjutnya Anggota V, Isma Yatun menyampaikan beberapa hal: pertama BPK akan terus berupaya meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan nasional. Dalam rencana strategis BPK Tahun 2016 s.d. 2020, BPK menempatkan diri sebagai pendorong pengelolaan keuangan negara dalam mencapai tujuan negara, melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

Kedua Pemerintah diminta untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangannya. Saat ini, wujud akuntabilitas dan transparansi tersebut tergambar dalam opini yang diberikan oleh BPK atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Terkait pemberian opini WTP atas LKPD Provinsi DKI Jakarta TA 2017, BPK memberikan penekanan atas suatu hal yaitu perlunya perhatian Pemda DKI Jakarta terhadap penatausahaan aset tetap secara berkelanjutan mengingat besarnya nilai, jumlah serta kompleksitas jenis aset tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Inventarisasi aset tanah milik Pemprov DKI Jakarta secara fisik dan secara administrasi, serta pengamanan secara legal dan fisik atas bukti kepemilikan aset tanah yang belum dilakukan secara menyeluruh.

Penekanan satu hal ini disampaikan untuk memberikan informasi kepada para pembaca laporan, bahwa pengelolaan atas Aset Tetap Pemerintah Provinsi DKI, masih harus tetap dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik

Hal yang ketiga adalah terkait jenis pemeriksaan selain pemeriksaan keuangan. BPK memandang, bahwa pertanggungjawaban keuangan tersebut akan lebih baik lagi, jika disertai dengan kualitas pengelolaan keuangan daerah, yang diwujudkan dalam bentuk program maupun kegiatan. Untuk membantu memberikan keyakinan yang memadai atas kinerja pengelolaan keuangan yang baik ini, BPK berkepentingan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jenis pemeriksaan kinerja. Dengan pemeriksaan kinerja ini, BPK akan dapat menilai mengenai ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) suatu program atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, laporan hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDDT yang BPK lakukan, diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan dan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta yang baru, diharapkan mampu memperkokoh keberadaan BPK di Provinsi DKI Jakarta dan memberikan kontribusi nyata dalam turut mewujudkan tata kelola keuangan daerah serta membina komunikasi yang baik dengan seluruh entitas di Provinsi DKI Jakarta. Demikian pula kepada seluruh jajaran BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk tetap melanjutkan transparansi dan akuntabilitas pemeriksaan BPK yang berkualitas, yang selama ini telah ditunjukkan dalam setiap penugasan pemeriksaan, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang disertai dengan penegakan nilai-nilai Independensi, Integritas dan Profesionalisme.

Di lain pihak, para pemangku kepentingan di Provinsi DKI Jakarta, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menjalin kerjasama melalui diskusi yang membangun dengan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sehingga BPK dapat memberikan laporan hasil pemeriksaan yang akan membantu pemerintah dalam melaksanakan amanat yang diembannya.

**Subbagian Humas**

**BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta**

Telp (021) 79180560 ext 3901